

**KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM KAITANNYA PADA
PEMBANGUNAN PERTANIAN**

Poverty And Welfare Concerning to Agricultural Development

Risqi Firdaus Setiawan*

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*email: risqisetiawan2014@gmail.com

SUBMITTED 29 April 2022, REVISED 23 Mei 2022, ACCEPTED 10 Juli 2022

ABSTRACT

This research is a study that discusses the relationship between poverty and welfare in agricultural development. The method used in this research is to use the library method or library research. In this section, an assessment of the concepts and theories used is carried out based on the available literature, especially from articles published in various scientific journals. The results of this study show that poverty in Indonesia has begun to decline but in absolute terms it is still very high. Narrow land tenure on the main commodity lands resulted in the return on investment not producing an adequate surplus so the lives of farmers remained poor. Steps that can be taken to reduce the percentage of poor people, especially in areas based on land farming, are to ensure that there is no reduction in land area for the main commodity. In addition, welfare improvement can be pursued through efforts to increase income and or increase household consumption needs. In line with the increase in the purchasing power of farmers, in general it is related to two Critical aspects of the policy, namely: First, the policy to increase farmers' household income as much as possible, and secondly, the policy to reduce costs or expenditures of farmer households as much as possible. Improving the welfare of farmers can also be done by developing partnerships and supply chains which are considered strategic as a solution to improve the quality of products produced by farmers.

Keywords: agricultural development, poverty, welfare, return of investment.

INTISARI

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang keterkaitan kemiskinan dan kesejahteraan dalam pembangunan pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kepastakaan atau library research. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Hasil Penelitian ini menunjukkan kemiskinan di Indonesia sudah mulai menurun namun secara absolut masih sangat tinggi. Penguasaan lahan yang sempit pada lahan komoditas utama mengakibatkan return on investment tidak menghasilkan surplus yang memadai sehingga kehidupan petani tetap miskin. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi persentase penduduk miskin terutama di wilayah-wilayah berbasis usaha tani lahan adalah dengan mengusahakan agar tidak terjadi pengurangan luas lahan bagi komoditas utama. Selain itu, peningkatan kesejahteraan dapat ditempuh melalui upaya untuk meningkatkan pendapatan dan atau meningkatkan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan peningkatan daya beli petani tersebut, secara garis besar terkait dengan dua aspek penting kebijakan, yaitu: Pertama, kebijakan untuk meningkatkan sebesar besarnya pendapatan rumah tangga petani, dan kedua, kebijakan untuk sedapat mungkin menekan biaya atau pengeluaran rumah tangga petani. Peningkatan kesejahteraan petani juga dapat dilakukan

dengan melakukan pengembangan kemitraan dan rantai pasok dinilai strategis sebagai solusi memperbaiki mutu produk yang dihasilkan petani.

Kata kunci: *pembangunan pertanian, kemiskinan, kesejahteraan, pengembalian investasi.*

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian pada dasarnya ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Untuk itu dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan pertanian kesejahteraan petani selalu menjadi tujuan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu dari empat target utama pembangunan pertanian (Kementan, 2010). Pembangunan pertanian berperan strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut ditunjukkan oleh perannya dalam pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktik usaha tani yang ramah lingkungan. Pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan (*sustainable agriculture*), sebagai bagian dari implementasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pearce et al. (1994) menyatakan bahwa, Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable development*) mempunyai makna dan tujuan yang lebih luas daripada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau *sustainable economic growth*. Tujuan-tujuan ekonomi, sosial dan ekonomi pada tingkat tertentu dapat bersinergi. Namun pada kondisi-kondisi tertentu di lapangan, ketiga-tiganya dapat saling bersaing dan kurang saling mendukung. Apabila hal ini terjadi, konsep keberlanjutan mengarah pada diperlukannya keseimbangan yang benar antara tiga dimensi tersebut. Pilihan-pilihan kebijakan perlu ditetapkan secara hati-hati dengan mempertimbangkan masing-masing dimensi yang saling berkaitan. Keberhasilan pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan sering kali dinilai dari perubahan tingkat kemiskinan (Wahyuni, D. 2017).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin perkotaan pada September 2021 turun dari 12,18 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,86 juta orang. Dari sisi persentase, penduduk miskin perkotaan juga turun menjadi 7,60%. Sementara di pedesaan, jumlah penduduk miskinnya sebanyak 14,64 juta orang pada September 2021, atau dari 15,37 juta orang pada Maret 2021. Persentasenya sebesar 12,53%, turun dari posisi Maret 2021 yang sebesar 13,10%. Besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata pada September 2021 adalah sebesar Rp2,18 juta per rumah

tangga miskin per bulan. Garis kemiskinan di Indonesia diukur dari nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin.

Selain angka kemiskinan, BPS juga memaparkan data ketimpangan atau gini ratio pada September 2021 dan mendapat kesimpulan bahwa gini ratio (koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk) di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan dikarenakan pengeluaran antar penduduk di perkotaan jaraknya semakin lebar, sedangkan di pedesaan karena sumber pendapatannya relatif sama di pertanian sehingga gini-nya lebih rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,00% yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang, sedangkan untuk daerah pedesaan angkanya 20,83% yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Pembangunan pertanian (termasuk pembangunan pedesaan) yang berkelanjutan merupakan isu penting strategis yang menjadi perhatian dan pembicaraan di semua negara dewasa ini. Pembangunan pertanian berkelanjutan selain sudah menjadi tujuan, tetapi juga sudah menjadi paradigma pola pembangunan pertanian. Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dirumuskan pada akhir tahun 1980-an sebagai respon terhadap strategi pembangunan sebelumnya yang lebih terfokus pada tujuan utama pertumbuhan ekonomi tinggi, dan yang terbukti telah menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun kualitas lingkungan hidup akibat dari eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Keberlanjutan pembangunan merupakan keberlanjutan peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat atau penduduk tempat mereka berada dan hidup, termasuk di dalamnya ketersediaan berbagai jenis pangan yang cukup dan bermutu. Ketahanan pangan harus dilihat dari konteks peningkatan kualitas hidup penduduk dan lingkungan hidup di pedesaan (Yacoub, Y., & Mutiaradina, H. 2020).

Pembangunan pertanian hakikatnya adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman selain ternak dan ikan guna menaikkan pendapatan keluarga petani melalui berbagai upaya baik dari internal maupun eksternal petani (Sedana, G. 2019). Oleh karena itu, disini penulis akan memberikan penjelasan mengenai kemiskinan serta kesejahteraan dalam kaitannya pada pembangunan pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kajian pustaka yang diperoleh atau dikaji dari sumber-sumber terpercaya yang berkaitan dengan kemiskinan, kesejahteraan,

pembangunan pertanian serta kaitan antara ketiganya. Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah – masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan di Daerah Pedesaan dan Perkotaan

Indonesia dihadapkan pada masalah angka kemiskinan yang tinggi. Pada tahun 2021, 27,54 juta orang atau 10,14 persen dari seluruh penduduk Indonesia masih termasuk kategori miskin (BPS, 2021). Angka ini rentan dengan perubahan terutama yang disebabkan oleh krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM atau bahan makanan pokok. Pada tahun 1998, ketika mulai krisis ekonomi pada tahun 1998, angka kemiskinan meningkat dari 11,3 persen pada tahun 1996 menjadi 24,2 persen pada tahun 1998 (BPS, 98). Hal ini mengindikasikan bahwa angka kemiskinan Indonesia akan meningkat tajam seiring dengan kenaikan BBM, kenaikan harga CPO dan penurunan inflasi yang tanpa disertai pertumbuhan di sektor real.

Penduduk miskin di Indonesia 63,41 persen diantaranya tinggal di pedesaan (BPS, 2021). Ini berarti, jika pembangunan pedesaan mampu menghapus angka kemiskinan penduduk desa, maka penduduk miskin akan berkurang sebanyak 63,41 persen atau 25,046,950 orang. Kondisi yang sama terjadi di desa-desa pesisir. Wilayah desa pesisir meliputi 8,090 buah desa dan menampung 16,420,000 jiwa penduduk yang 32,14 persen diantaranya termasuk kategori penduduk miskin (DKP, 2022).

Sampai dengan tahun 2021 jumlah desa di Indonesia mencapai 71.215. Jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan akan semakin bertambah mengingat bahwa pemerintah mengakomodir adanya pemekaran desa-desa. Namun, pedesaan dan pertanian masih lekat dengan isu kemiskinan. Sampai tahun 2021 penduduk miskin di Indonesia masih lebih banyak berada di pedesaan dari pada perkotaan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Gambar 1. Grafik Perbandingan Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2018-2021

Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan

Sebagaimana diketahui, penanggulangan kemiskinan telah lama dilakukan sejalan dengan munculnya permasalahan kemiskinan. Berbagai program tersebut telah dilakukan berbagai instansi pemerintah dengan jumlah dana yang relatif besar. Sebagai contoh berdasarkan data lima tahun yang lalu, pada tahun 2016 (Bina Desa No.88/Maret/2016) secara keseluruhan pemerintah waktu itu menganggarkan dana sebesar Rp 16,541 triliun untuk penanggulangan kemiskinan yang akan disalurkan melalui 16 departemen dan instansi pemerintah. Dana tersebut akan mencakup 69 program dengan rincian bahwa 16 program untuk penanggulangan kemiskinan, 33 program reguler, 13 crash program dan 8 untuk program lainnya. Pada waktu itu (2016) program-program tadi ditujukan untuk mengurangi jumlah kemiskinan sebesar 2,77 juta jiwa dan mempunyai sasaran hingga tahun 2018. Dengan pengurangan angka kemiskinan per tahun 2,27 juta jiwa, sehingga angka kemiskinan selama tiga tahun dapat ditekan 8,3 juta jiwa.

Sedangkan, program-program sektor pertanian yang berorientasi penanggulangan kemiskinan di pedesaan juga relatif banyak, seperti P4K, Delivery, P2LK, Pidra, PK2PM, Poor Farmers (PFI3P/P4UM), PKMP, LUEP, Primatani dan program lainnya. Program-program tersebut dirancang untuk dapat langsung memberdayakan para petani miskin di pedesaan, dengan berbagai pendekatan masing-masing (Harniati, 2017). Program penanggulangan kemiskinan dalam implementasinya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga telah banyak dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh LSM Bina Swadaya diantaranya: (1) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dalam program-program penanggulangan kemiskinan; (2) Peningkatan peran corporate melalui program CSR; (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal masyarakat; dan (4) Penyediaan fasilitas kredit mikro melalui lembaga keuangan mikro (Hermantyo *et al.*, 2017 dan Irawati, 2017). Dari keseluruhan program penanggulangan kemiskinan tersebut, diharapkan pengentasan kemiskinan khususnya pada sektor pertanian dan

kemiskinan di pedesaan secara bertahap dapat mencapai sasaran, sehingga jumlah masyarakat miskin di pedesaan yang sebagian besar dialami oleh para petani dapat berkurang.

Faktor Penyebab Kemiskinan dan Kaitannya dengan Ketahanan Pangan

Berbagai faktor dapat diidentifikasi sebagai penyebab dari kemiskinan di pertanian. Rendahnya penguasaan sumberdaya produktif dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia sering disebut sebagai faktor utama penyebab kemiskinan di pertanian. Namun terlalu sederhana jika penyebab kemiskinan hanya bertumpu pada dua faktor tersebut. Berbagai program yang mampu memberikan akses penduduk miskin terhadap sumberdaya produktif maupun perbaikan kualitas sumberdaya manusia tidak akan banyak artinya, apabila struktur ekonomi yang melingkupinya masih memposisikan penduduk miskin ini hanya sebagai penghasil surplus sedangkan penduduk miskin itu sendiri tidak mampu menikmati surplus yang dihasilkannya. Dengan kata lain, sepanjang struktur ekonomi yang terbangun di pertanian masih bersifat monopsonistik dan monopolistik, maka sulit mengharapkan adanya pengurangan kemiskinan di pertanian secara nyata.

Pengurangan penduduk miskin di pertanian tidak saja perlu ditinjau dari sudut pandang petani dan keluarganya serta hubungannya dengan lingkungan ekonomi dan sosial yang melingkupinya, namun juga perlu dicermati hubungan atau keterkaitan antar sektor dan antar wilayah. Keberhasilan pembangunan pertanian akan ditentukan oleh arah pembangunan makro maupun arah pembangunan sektor lainnya. Kebijakan moneter dan fiskal, di aspek makro, akan secara langsung berpengaruh terhadap sektor pertanian. Demikian juga, arah kebijakan sektor industri akan menentukan keterkaitannya dengan sektor hulunya dan seberapa jauh pertanian dapat memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.

Gambaran Perbandingan Kemiskinan Era Sebelum dan Sesudah Reformasi

Kondisi pada era Reformasi tidak membawa perubahan yang signifikan bagi perbaikan perekonomian Indonesia. Semangat perubahan yang dikobarkan pada kenyataan tidak diikuti oleh perubahan mendasar pada kebijakan nasional. Pemerintah rezim Reformasi masih saja menganut strategi pertumbuhan ekonomi (*economic growth strategy*) sehingga bentuk-bentuk kebijakan pun tidak jauh berbeda dibandingkan rezim sebelumnya. Rezim ini mengadopsi strategi ekonomi neo-liberal yang menganut prinsip-prinsip *minimum state*, yang terlihat dari kebijakan seperti pengurangan subsidi untuk sektor riil, privatisasi yang tidak terkendali, serta kebijakan non tarif bagi produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah karena dorongan arus globalisasi dan perdagangan bebas yang sangat kuat. Namun jelas *opportunity cost* dalam menjalankan kebijakan ini sangat besar. Akibat yang mencolok dalam kondisi seperti ini adalah *global private sovereignty* yang saat ini justru mengontrol ekonomi nasional di satu sisi, sementara sementara di sisi lain melemahnya negara ternyata juga diikuti dengan melemahnya swasta nasional. Implikasinya pencabutan subsidi untuk sektor riil dan kebijakan non tarif, sebagai contoh, akan menghancurkan sektor riil domestik. Banyak usaha pertanian yang terhenti karena biaya produksi yang semakin

tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan produk-produk impor. Kondisi ini akan memperkuat ketergantungan pada produk impor termasuk kebutuhan pokok, dan mengancam ketahanan pangan nasional. Ternyata, setelah memasuki 10 tahun sejak krisis ekonomi melanda, kondisi makro dan mikro Indonesia masih terlihat jalan di tempat dan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Inilah yang menyebabkan fondasi ekonomi yang lemah karena berlandaskan *bubble economy* di mana orientasi lebih besar pada sektor spekulasi finansial melalui perbankan dan perdagangan mata uang sementara sektor riil cenderung diabaikan. Secara keseluruhan, kondisi ini menyebabkan Indonesia sulit keluar dari krisis. Padahal era Orde Baru dengan *state* yang kuat ternyata mampu mendongkrak perkembangan sektor riil, terlepas dari persoalan bahwa terjadi ketimpangan ekonomi di dalamnya.

Sejarah pembangunan ekonomi masa lalu di Indonesia dan berbagai negara lain, memberikan pelajaran bagaimana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat menjadi penghambat berkembangnya sektor pertanian. Masih sedikit perhatian diberikan bagi keterkaitan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan dengan pembangunan pertanian. Ada dua penyebab mengapa timbul sikap seperti itu, yaitu orientasi yang terlalu sektoral dalam analisis kebijakan pertanian di masa lalu dan adanya pandangan yang sempit dalam melihat peranan pertanian dalam pembangunan pertanian.

Dalam praktiknya, kebijakan pembangunan masa lalu adalah percepatan industrialisasi. Secara aktif pemerintah mendorong industri domestik dengan berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang memihak industri ini menciptakan distorsi insentif harga yang merugikan pertanian. Kebijakan-kebijakan tersebut secara substantif mengurangi efek positif dari berbagai kebijakan pertanian yang dimaksudkan untuk mendukung pembangunan pertanian. Pembangunan infrastruktur di pertanian dan pedesaan, kebijakan pemasaran produk pertanian, maupun dukungan terhadap penelitian dan penyuluhan pertanian menjadi kurang berarti saat terjadi distorsi insentif tersebut. Distorsi insentif yang merugikan pertanian berdampak pada: (a) rendahnya output pertanian dibandingkan dengan yang seharusnya apabila tak ada distorsi, (b) daya beli riil penduduk di pertanian dan pedesaan menurun, dan (c) munculnya kendala yang nyata di sisi permintaan dalam perekonomian. Kebijakan industri substitusi impor menciptakan struktur insentif yang merugikan produsen produk untuk ekspor dan produsen produk primer, dalam hal ini adalah pertanian.

Pangsa pertanian dalam produk total perekonomian memang semakin turun. Meskipun hal ini merupakan gejala umum dari pembangunan ekonomi, namun penurunan tersebut dipercepat oleh kebijakan yang mengedepankan industrialisasi. Pada tahap awal industrialisasi pendekatan yang digunakan umumnya adalah pembangunan industri substitusi impor. Untuk mendorong industri substitusi impor ini ditetapkan kebijakan tarif ataupun berbagai restriksi impor lainnya. Di samping itu, kebijakan nilai tukar juga diciptakan agar memudahkan impor barang modal ataupun bahan baku dari luar negeri. Saat negara menyadari perlunya mendorong ekspor produk industri, maka kebijakan-kebijakan yang diambil ternyata tetap cenderung bias melawan pertanian. Karena itulah

Indonesia perlu melakukan pergeseran paradigma pembangunan, yang kondusif bagi upaya mengembalikan dasar perekonomian pada khittah-nya yaitu pertanian, yang merupakan sumber kehidupan mayoritas penduduk Indonesia. Dasar pembangunan tidak lagi pada *high economic growth*, namun mengarah pada *social welfare* dalam jangka panjang.

Dalam konteks ekonomi, paradigma baru pembangunan harus menggeser paradigma pembangunan lama yang berorientasi pada semata pertumbuhan ekonomi dengan melalui industrialisasi substitusi impor dan terakhir menjadi promosi ekspor yang bersifat *footloose industry* yang bias terhadap kepentingan masyarakat menengah kota, yang pada gilirannya mengorbankan sektor pertanian dalam arti luas dan pedesaan. Paradigma lama ini juga bertumpu pada pembangunan ekonomi ekstraktif semata yang pada gilirannya menceraiberaut hak-hak masyarakat atas sumberdaya lokal, menghancurkan kondisi ekologis dan menciptakan pemiskinan secara masif. Sementara itu paradigma baru pembangunan ekonomi adalah pembangunan berorientasi membangun pelaku ekonomi yang berbasis luas melalui proses industrialisasi yang menciptakan kesempatan kerja penuh (*full employment*), berbasis sumberdaya lokal, dan berdaya dukung.

Paradigma baru pembangunan mengajukan sumberdaya alam domestik khususnya pertanian dalam arti luas menjadi fokus dalam proses industrialisasi dengan kandungan IPTEK yang tepat guna, masif, dan berdaya-dukung lingkungan. Model industrialisasi dapat menciptakan kemakmuran baru yang berbasis luas karena akan menciptakan aksesibilitas terhadap seluruh sumberdaya produktif (manusia, kelembagaan, modal, informasi dan teknologi) bagi masyarakat secara keseluruhan. Bersamaan dengan itu, kebangkitan kembali industri manufaktur non-agro yang ada didorong dengan terciptanya peningkatan daya beli masyarakat secara luas dan lebih lanjut mendorong kemakmuran baru yang tercipta dari industri yang berbasis pertanian dalam arti luas maupun industri manufaktur non-agro. Kombinasi agroindustri yang berbasis IPTEK dan industri manufaktur yang punya kaitan ke depan dan ke belakang diharapkan membangun pelaku ekonomi nasional yang jauh lebih luas sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja penuh.

Paradigma baru pembangunan tersebut membutuhkan peran negara dan pasar secara proporsional, tepat guna dan bijak. Dalam kaitan tersebut, terdapat urgensi menciptakan kebijakan fiskal progresif yang membangun infrastruktur pertanian dalam arti luas dan pedesaan yang ditopang oleh kebijakan moneter yang tepat serta pergeseran dari kebijakan sistem perbankan berbasis cabang kepada sistem perbankan yang berbasis unit dimana pengembangan kebutuhan kredit diidentifikasi berdasarkan stimulus lokal.

Upaya penguatan kelembagaan petani ini perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak karena merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. DPR RI melalui fungsi pengawasan, hendaknya dapat mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Hal yang perlu digaris bawahi dari undang-undang tersebut adalah ganti rugi gagal panen dan fasilitas pembiayaan bagi petani harus benar-benar diimplementasikan. Sektor

pertanian sangat dipengaruhi oleh gejolak alam sehingga semakin terbuka kemungkinan terjadinya gagal panen. Oleh karena itu, asuransi pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut sangat penting agar petani memperoleh modal untuk bercocok tanam kembali ketika mengalami gagal panen. Selain itu, terkait pembiayaan, pemerintah dan pemerintah daerah hendaknya segera menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melayani petani agar dapat memperoleh pembiayaan usaha tani. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap kredit dari tengkulak.

Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Petani

Konsep NTP sebagai indikator kesejahteraan petani mengacu kepada kemampuan daya beli petani, yaitu kemampuan pendapatan yang diterima petani untuk dapat memenuhi memperbaiki kebutuhan konsumsi. Peningkatan kesejahteraan identik dengan peningkatan pendapatan untuk memperbaiki/ meningkatkan kebutuhan konsumsi. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan dapat ditempuh melalui upaya untuk meningkatkan pendapatan dan atau meningkatkan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan peningkatan daya beli petani tersebut, secara garis besar terkait dengan dua aspek penting kebijakan, yaitu: Pertama, kebijakan untuk meningkatkan sebesar besarnya pendapatan rumah tangga petani, dan Kedua, kebijakan untuk sedapat mungkin menekan biaya/pengeluaran rumah tangga petani.

Kebijakan di Bidang Pendapatan Rumah Tangga Petani

Pendapatan rumah tangga petani dapat berasal dari kegiatan usaha di bidang pertanian, yaitu kegiatan usahatani (*on-farm*) dan pendapatan kegiatan pertanian di luar usahatani (*off-farm*) seperti usaha pasca panen, pengolahan hasil pertanian, dan buruh tani secara luas; dan pendapatan rumah tangga dari usaha diluar kegiatan pertanian (*non-farm*) seperti kegiatan dagang, kegiatan industri non pertanian, jasa, pegawai, buruh non pertanian dan lain-lain. Peningkatan pendapatan rumah tangga petani berkaitan dengan peningkatan akses petani terhadap sumber pendapatan petani lebih beragam. Peningkatan pendapatan usaha komoditas pertanian (*on-farm*) secara luas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan dan kehutanan secara langsung akan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Beberapa studi menunjukkan peran pendapatan dari *on farm* cenderung semakin menurun dan pendapatan rumah tangga petani lebih terdiversifikasi (Handewi *et al.*, 2004; Susilowati *et al.*, 2009; Susilowati *et al.*, 2012). Hal ini terutama berkaitan dengan menurunnya skala pemilikan dan pengusahaan lahan petani akibat dari konversi lahan pertanian, degradasi lahan dan tekanan penduduk (Kasryno dan Soeparno, 2012; Rachmat dan Muslim, 2011; Sumaryanto, 2009; Susilowati dan Maulana, 2012). Kondisi ini berakibat adanya kecenderungan tingkat pendapatan usahatani tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan upaya meningkatkan perbaikan pola konsumsi. Kondisi ini mendorong anggota rumah tangga untuk mencari sumber pendapatan lain diluar kegiatan usahatani.

Beberapa hasil kajian menunjukkan peran pendapatan dari non pertanian menunjukkan proporsi yang semakin meningkat. Peningkatan pendapatan dari non pertanian (*non-farm*) tersebut sejalan dengan terbukanya peluang usaha di kegiatan non pertanian akibat pertumbuhan ekonomi yang telah berjalan. Peningkatan lapangan kerja di luar bidang pertanian akan berdampak positif dalam diversifikasi sumber lapangan kerja dan pendapatan rumah tangga petani, dan kondisi ini berkontribusi positif dalam perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga petani. Untuk itu pengembangan sektor di luar pertanian perlu terus didorong. Terbukanya kesempatan kerja di non pertanian berarti adanya pengurangan beban tenaga kerja di sektor pertanian (usahatani). Hal ini berdampak positif dalam peningkatan produktivitas kerja pertanian. Dengan penurunan beban tenaga kerja pertanian memungkinkan penerapan teknologi maju yang relatif lebih padat modal seperti dalam penerapan alsintan. Pada kondisi luas lahan garapan terbatas, peningkatan produktivitas menjadi penting, antara lain pendekatan pengembangan usahatani terpadu dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan yang terbatas. Dengan pola usahatani terpadu akan mengurangi resiko akibat kegagalan produksi dari suatu tanaman tertentu. Pengembangan pola usahatani terpadu juga dinilai strategis sebagai langkah antisipasi kondisi anomali iklim yang sulit diprediksi yang terjadi saat ini.

Upaya ini perlu didukung oleh peningkatan akses terhadap teknologi, perolehan input produksi, modal kerja, dan pasar. Dengan keterbatasan yang dialami oleh petani kecil, untuk meningkatkan akses petani terhadap layanan usahatani tersebut perlu dukungan pemerintah dengan pemberian subsidi input produksi (benih, pupuk, pestisida), kredit bersubsidi, dan jaminan pasar dan harga jual produk yang dihasilkan. Selama ini kebijakan subsidi input produksi telah dilakukan pemerintah melalui pemberian bantuan dan subsidi harga benih, subsidi harga pupuk, pestisida dan subsidi bunga kredit. Kebijakan jaminan harga telah dilakukan pemerintah namun terbatas kepada komoditas tertentu, yaitu beras dan gula, sementara untuk komoditas lain masih ditentukan oleh mekanisme pasar. Kebijakan harga (*price support*) yang dilakukan pemerintah terhadap beras dan gula ditujukan dalam rangka: (a) melindungi produsen dari kemerosotan harga pasar, yang umumnya terjadi pada musim panen, (b) melindungi konsumen dari kenaikan harga yang melebihi daya beli, yang umumnya terjadi pada musim paceklik, (c) mengendalikan inflasi melalui stabilisasi harga. Kondisi ini dinilai strategis dalam rangka pencapaian solusi terbaik pembentukan harga bagi produsen, konsumen dan pembentukan inflasi.

Dengan keterbatasan pemerintah dan dengan banyaknya komoditas pertanian yang perlu mendapat perhatian, maka langkah yang dapat ditempuh adalah melalui pengembangan pola kemitraan petani-pengolah-eksportir dengan mengembangkan sistem rantai pasok. Pengembangan kemitraan dan rantai pasok ini dinilai strategis sebagai solusi memperbaiki mutu produk yang dihasilkan petani, kepastian pasar dan harga yang diterima petani serta memperbaiki sistem tataniaga (pemasaran) hasil pertanian yang tidak efisien. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha pada setiap komoditas dilakukan melalui program sektoral. Disamping itu terdapat pula program

khusus peningkatan kesejahteraan petani dan penanggulangan kemiskinan, pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program PNPM Mandiri. Kedua program tersebut masih sangat relevan dalam merangsang tumbuhnya usaha di bidang pertanian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemiskinan di Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu sangat lama merupakan kemiskinan yang persisten, yaitu secara persentase menurun namun secara absolut masih cukup tinggi. Fenomena rawan pangan cerminan kemiskinan di agroekosistem sawah terkait dengan gestation period tanam padi yang terjadi pada waktu dan lokasi yang relatif seragam; fenomena ijon yang menciptakan interlocking market; sharing arrangement yang adil pada sistem sakah yang sering tidak terwujud; dan kesempatan berburu pada kelompok buruh tani yang hanya periode singkat selama tenaga mereka dibutuhkan. Pada agroekosistem lahan kering, fenomena kemiskinan di kalangan petani kecil mengarah pada tanaman subsisten yang diusahakan kurang intensif karena keterbatasan modal dan teknologi.

Penguasaan lahan yang sempit pada lahan komoditas utama mengakibatkan return on investment tidak menghasilkan surplus yang memadai sehingga kehidupan petani tetap miskin. Keterkaitan antara persentase kepemilikan lahan dengan kemiskinan menunjukkan korelasi negatif yang mengindikasikan menyempitnya kepemilikan lahan maka persentase penduduk miskin semakin tinggi. Dengan demikian maka salah satu kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi persentase penduduk miskin terutama di wilayah-wilayah berbasis usaha tani lahan adalah dengan mengusahakan agar tidak terjadi pengurangan luas lahan bagi komoditas utama.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan dapat ditempuh melalui upaya untuk meningkatkan pendapatan dan atau meningkatkan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan peningkatan daya beli petani tersebut, secara garis besar terkait dengan dua aspek penting kebijakan, yaitu: Pertama, kebijakan untuk meningkatkan sebesar besarnya pendapatan rumah tangga petani, dan Kedua, kebijakan untuk sedapat mungkin menekan biaya atau pengeluaran rumah tangga petani.

Peningkatan kesejahteraan petani juga dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan kemitraan dan rantai pasok dinilai strategis sebagai solusi memperbaiki mutu produk yang dihasilkan petani, kepastian pasar dan harga yang diterima petani serta

memperbaiki sistem tataniaga (pemasaran) hasil pertanian yang tidak efisien. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha pada setiap komoditas dilakukan melalui program sektoral. Disamping itu terdapat pula program khusus peningkatan kesejahteraan petani dan penanggulangan kemiskinan, pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program PNPM Mandiri. Kedua program tersebut masih sangat relevan dalam merangsang tumbuhnya usaha di bidang pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2018). Badan pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta
- Badan Pusat Statistik (2021). Statistik Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappeda Provinsi Jawa Timur (2012). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian Pertanian (2010). Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014. Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Pierce, D.A., Markandya and E.B. Barbier. (1994). Blueprint for a Green Economy/Earthscan Publ. Ltd. London, 192 pp. Tersedia dari: <http://kasumbogo.staff.ugm.ac.id/?satoewarna=index&winoto=base&action=1istmenu&skins=1&id=137&tk=2>
- Sedana, G. 2019, December. Menuju Pembangunan Pertanian Berkelestarian. In Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali (pp. 8-15). Tersedia dari: <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/semnaspk/article/view/35>
- Susilowati, S.H. dan M. Maulana (2012). Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. Analisis Kebijakan Pertanian. Vol 11 (1): 17-30. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Susilowati, S.H. T.B. Purwantini. D. Hidayat. (2012). Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agroekosistem Kering Berbasis Perkebunan. Laporan Penelitian Patanas. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Susilowati, S.H., T.B. Purwantini, Sugiarto. (2009). Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan. Laporan Penelitian Patanas. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Wahyuni, D. 2017. Penguatan kelembagaan petani menuju kesejahteraan petani. Jurnal Kesejahteraan Sosial, 10(17), 9-12. Tersedia dari: http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-17-I-P3DI-September-2017-218.pdf
- Yacoub, Y., & Mutiaradina, H. 2020. Analisis kesejahteraan petani dan kemiskinan perdesaan di Indonesia. In Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (pp. 92-102). Tersedia dari: https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Lengkap-1_compressed-min.pdf#page=101